

Risiko & Konsekuensi Pemerintahan yang Didominasi Akomodasi Politik Dengan Mengabaikan Kompetensi

Perkumpulan Amerta
Januari, 2026

PENGANTAR-1

Biaya Akomodasi Politik dan Tata Kelola Lingkaran Dalam (*Inner Circle*) di Indonesia

Dalam beberapa tahun terakhir, tata kelola Indonesia semakin dipengaruhi oleh akomodasi politik dan konsentrasi pengambilan keputusan di dalam lingkaran dalam yang sempit di sekitar eksekutif, seringkali mengorbankan profesional, teknokrat, dan birokrat karier yang memiliki pengalaman institusional yang panjang. Meskipun akomodasi politik tidak secara inheren negatif—dan dapat diperlukan untuk menjaga stabilitas dalam demokrasi plural—dominasi berlebihan dalam pembentukan kebijakan, respons krisis, dan penyediaan layanan publik telah menghasilkan konsekuensi serius dan kumulatif.

Ketika posisi kunci diisi terutama berdasarkan loyalitas, kedekatan, atau keseimbangan koalisi, daripada kompetensi dan rekam jejak, kemampuan negara untuk merumuskan, mengantisipasi, dan melaksanakan kebijakan melemah. Hal ini terutama berbahaya dalam konteks Indonesia saat ini: negara kepulauan besar yang menghadapi ketimpangan sosial-ekonomi yang semakin melebar, bencana alam akibat perubahan iklim, pasar global yang volatil, dan ekspektasi sosial yang kompleks.

PENGANTAR-2

Pembuatan Kebijakan: Dari Pemecahan Masalah ke Politik Jangka Pendek

Pembuatan kebijakan yang didominasi oleh lingkaran dalam yang ditunjuk secara politik cenderung memprioritaskan visibilitas politik jangka pendek daripada pemecahan masalah jangka panjang. Keputusan sering kali didorong oleh hal-hal yang secara simbolis menarik, berguna secara elektoral, atau ramah koalisi, daripada analisis yang ketat, data, dan koordinasi lintas sektor. Akibatnya, Indonesia mengalami:

- Perubahan kebijakan yang sering dan ketidakkonsistenan regulasi
- Ketergantungan berlebihan pada program unggulan tanpa landasan teknis yang kuat
- Ketidakselarasan antara rencana nasional dan realitas implementasi di tingkat regional dan lokal

Kondisi ini mengesampingkan pengetahuan institusional di kementerian dan lembaga, mengikis kemampuan negara untuk merancang respons yang koheren terhadap isu-isu struktural seperti peningkatan industri, ketahanan pangan, transisi energi, dan pengurangan ketimpangan.

PENGANTAR-3

Tanggap Bencana: Visibilitas Tinggi, Kesiapan Rendah

Indonesia merupakan salah satu negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia. Pengelolaan bencana yang efektif bergantung pada antisipasi, koordinasi, dan kesiapan teknis, bukan improvisasi. Dominasi kelompok dalam tanpa pengalaman yang memadai seringkali menyebabkan:

- Tanggap bencana yang reaktif daripada preventif
- Koordinasi yang terfragmentasi antara pemerintah pusat, otoritas lokal, dan lembaga teknis
- Penundaan dalam peringatan dini, evakuasi, dan pemulihan pasca-bencana

Pemimpin politik mungkin muncul dengan cepat di lokasi bencana, tetapi tanpa sistem profesional yang kuat di belakang mereka, tanggapan menjadi ad hoc, mahal, dan tidak memadai, meningkatkan kerugian manusia, ekonomi, dan ekologi.

PENGANTAR-4

Layanan Publik: Kualitas Menurun, Frustrasi Meningkat

Dalam layanan publik—perizinan, kesehatan, pendidikan, bantuan sosial—dampak paling langsung dirasakan oleh warga. Ketika profesional berpengalaman diabaikan, lembaga publik menghadapi:

- Pelayanan yang lambat dan tidak konsisten
- Penargetan program sosial yang buruk
- Akuntabilitas dan pengawasan yang lemah

Bagi warga Indonesia biasa, hal ini berarti antrean panjang, aturan yang membingungkan, akses yang tidak merata, dan biaya harian yang terus meningkat, memperkuat persepsi bahwa negara lebih melayani elit politik dengan fasilitas dan sumber daya yang jauh lebih besar daripada masyarakat umum.

PENGANTAR-5

Masalah Struktural, Bukan Masalah Personal

Masalahnya bukan sekadar tentang individu yang kurang mampu, tetapi tentang struktur tata kelola yang secara sistematis meremehkan pengalaman, kompetensi, dan pembelajaran institusional. Seiring waktu, hal ini menciptakan lingkaran setan: institusi yang melemah membenarkan ketergantungan lebih lanjut pada lingkaran dalam yang dipercaya, yang pada gilirannya semakin melemahkan negara.

Dalam masyarakat yang sudah tertekan oleh ketidaksetaraan dan ketidakpastian sosial dan ekonomi, model semacam ini berisiko mengubah stabilitas politik menjadi kerentanan institusional—di mana pemerintah tampak kuat di pusat, tetapi rapuh dalam kemampuannya untuk memberikan layanan, melindungi, dan merespons.

1. Strategic Governance Risks

A. Kebijakan yang Berfokus pada Jangka Pendek dan Kurangnya Visi Jangka Panjang

- Pejabat yang ditunjuk lebih memprioritaskan kelangsungan politik, loyalitas, dan pencitraan daripada reformasi struktural jangka panjang.
- Agenda jangka menengah hingga panjang (kualitas pendidikan, peningkatan industri, ketahanan fiskal, pemulihan ekosistem) kurang dikembangkan.

B. Hilangnya Memori Institusional

- Birokrasi Indonesia (ASN) memiliki puluhan tahun pengetahuan tacit tentang regulasi, koordinasi antar kementerian, dan realitas lokal.
- Mengabaikan mereka mengakibatkan kesalahan berulang, pembalikan kebijakan, dan implementasi yang lemah.

C. Pusat Kekuasaan yang Berlebihan

- Keputusan terpusat di lingkaran kecil presiden, melemahkan sistem checks and balances.
- Kementerian dan lembaga menjadi pelaksana, bukan pemikir kebijakan.

Akibat

- Regulasi yang tidak konsisten (revisi berkala atas keputusan menteri)
- Ketidakselarasan antara rencana nasional (RPJMN) dan kebijakan sektoral
- Penurunan kredibilitas kebijakan di kalangan daerah dan investor

2. Economic & Development Risks

A. Alokasi Sumber Daya yang Tidak Efisien

- Proyek-proyek dipilih berdasarkan simbolisme politik (proyek-proyek besar, program-program populis) daripada produktivitas dan inklusivitas.
- Alat-alat teknokratis (analisis biaya-manfaat, penargetan kemiskinan, analisis multiplier) diabaikan.

B. Penangkapan Sumber Daya Negara oleh Elite

- Pejabat yang ditunjuk secara politik lebih rentan terhadap: Pencarian rente, Kapitalisme kroni, Pembuatan regulasi untuk kepentingan oligarki
- Hal ini memperkuat ekonomi Indonesia yang berbasis sumber daya dan bernilai tambah rendah.

C. Peningkatan Ketidaksetaraan

- Bantuan sosial menjadi transaksional dan terfragmentasi.
- Ketidaksetaraan struktural (akses pendidikan, kepemilikan tanah, pembiayaan UMKM) tetap tidak tersentuh.

Akibat

- Pertumbuhan tanpa lapangan kerja berkualitas
- Penurunan daya beli kelas menengah bawah
- Ketimpangan regional yang persisten (Jawa vs Pulau-pulau Luar)

3. Bureaucratic & Institutional Risks

A. Demoralisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

- Prestasi, masa kerja, dan kompetensi kehilangan nilainya.
- Promosi bergantung pada kedekatan politik, bukan kinerja.

B. Pengeringan Otak (*brain drain*)

- Teknokrat berbakat pindah ke:
 - BUMN
 - Sektor swasta
 - Organisasi internasional
- Institusi publik menjadi “kosong”, karena yang tertinggal adalah mereka yang tidak memiliki kompetensi dan operator politik.

C. Erosi Standar Profesional

- Kebijakan berbasis bukti, analisis dampak regulasi, dan tata kelola data melemah.
- Kebijakan didasarkan kalkulasi risiko politik, sentimen pendukung, dan “asal bapak senang”.

Akibat

- Penurunan kualitas layanan publik
- Penundaan dan kebingungan pada tingkat implementasi
- Peningkatan risiko korupsi pada tingkat operasional

4. Social & Political Risks

A. Kehilangan Kepercayaan Publik

- Warga negara memandang negara sebagai pelayan elit, bukan pelayan publik.
- Transparansi dan akuntabilitas menurun di berbagai jajaran pemerintahan sehingga berbagai bentuk korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan berkembang.

B. Dominasi Populisme & Polarisasi

- Ketika teknokrasi runtuh, politik mengisi kekosongan dengan:
 - Narasi identitas
 - Pengalihan kesalahan/pengambilan hitaman
 - Kebijakan simbolis

C. Ketidakstabilan Sosial

- Ketidaksetaraan + tata kelola yang buruk meningkatkan risiko:
 - Ketidakstabilan buruh
 - Gerakan mahasiswa
 - Keluhan regional

Akibat

- Biaya transaksi politik yang lebih tinggi
- “Jarak” yang semakin lebar antara negara dan warga negara, meski pejabat negara sering menemui warga
- Kohesi sosial yang rapuh karena kelompok yang merasa dekat dengan penguasa cenderung hegemonik.

5. Democratic & Constitutional Risks

A. Pelemahan Penegakan Hukum

- Pejabat yang ditunjuk secara politik mengaburkan batas antara:
 - Kebijakan
 - Politik
 - Penegakan hukum
- Penegakan hukum yang “tebang pilih” menjadi hal yang umum.

B. Erosi Meritokrasi

- Negara menjadi sistem patronase, bukan lembaga profesional.
- Pemilihan umum diperjuangkan karena menentukan akses ke sumber daya negara, bukan arah kebijakan.

C. Kemunduran Demokrasi

- Demokrasi formal tetap ada, tetapi demokrasi substansial mengalami degradasi.
- Institusi demokrasi dan institusi pengawasannya kehilangan kemandirian karena menjadi alat kekuasaan.

Akibat

- Penurunan kualitas dan reputasi demokrasi semakin rendah
- Kepercayaan investor menurun sehingga investasi asing yang masuk semakin sulit dan mahal
- Peningkatan risiko krisis konstitusional

PERINGATAN

Political Appointments Dominant



Technocracy & Bureaucracy Marginalized



Weak Policy Design & Elite Capture



Inequality & Economic Fragility



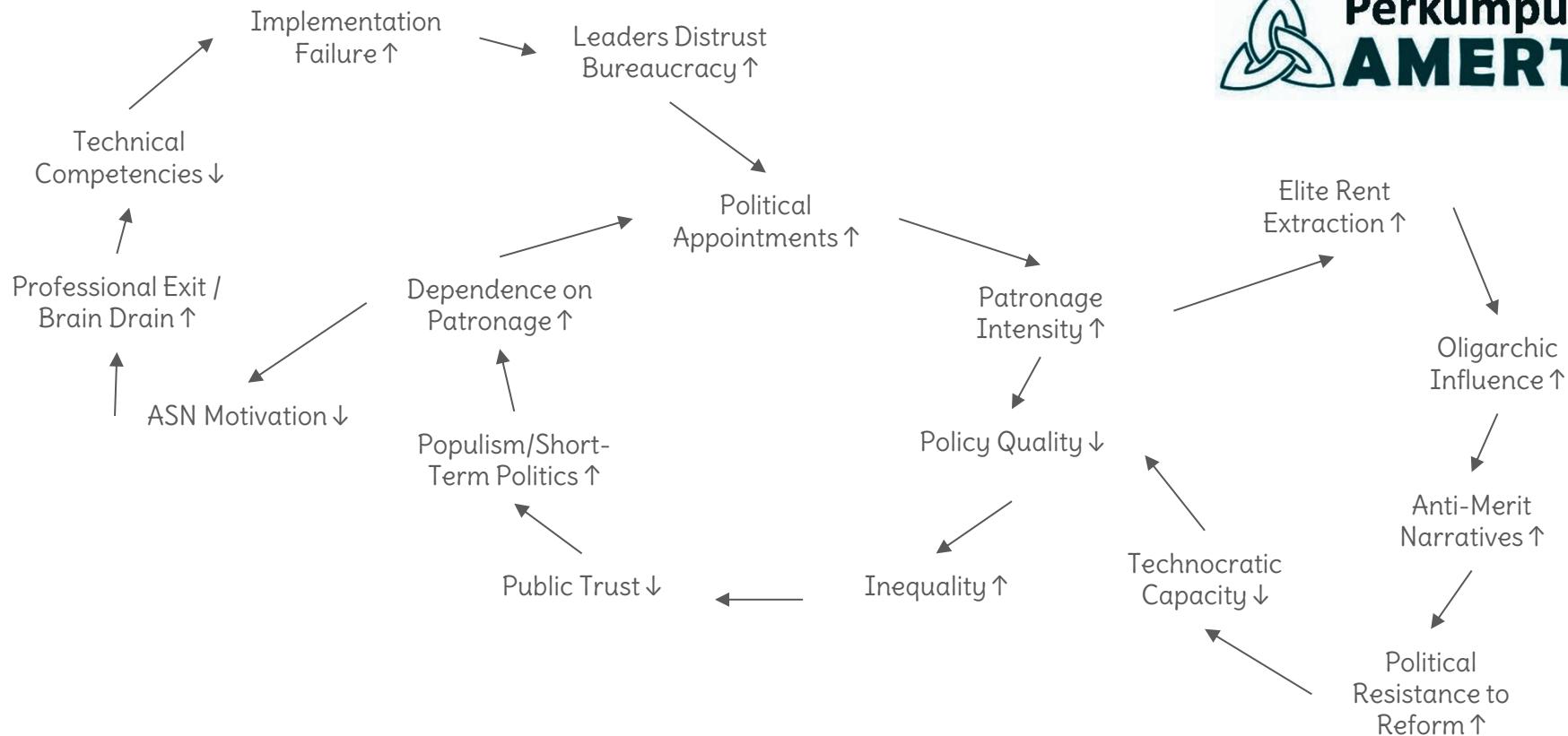
Public Distrust & Social Unrest



Authoritarian Drift or Populist Governance

Tanda-tanda Awal yang Perlu Diwaspadai

- Perombakan jabatan yang sering dilakukan tanpa dasar kinerja
- Kebijakan diumumkan tanpa didukung oleh dokumen teknis atau studi dampak
- Jumlah staf khusus yang semakin meningkat dan melewati hierarki formal
- Anggaran yang lebih condong ke proyek unggulan daripada pengembangan sumber daya manusia
- Penurunan moral dan profesionalisme pegawai negeri sipil (ASN)
- Peningkatan penggunaan pendekatan keamanan untuk masalah sosial-ekonomi



Analisa Sistem – Lingkaran Setan Birokrasi

Pengalaman Negara Lain: Korea Selatan (1960-an–1990-an): Negara Otoriter → Negara Teknokratis

- Kepemimpinan politik menggunakan teknokrat secara agresif
- Birokrasi dibatasi sekaligus diterapkan secara optimal dalam:
 - Perencanaan pembangunan
 - Industri
 - Pendidikan
- Legitimasi kinerja menggantikan legitimasi elektoral

Pelajaran untuk Indonesia:

- ✓ Teknokrasi dapat berdampingan dengan politik yang kuat
- ✗ Namun memerlukan disiplin, evaluasi, dan kohesi kebijakan

Pengalaman Negara Lain: Singapura: Model Meritokrasi Penuh

- Penerapan secara ketat dan menyeluruh pendekatan teknokratik dalam melaksanakan birokrasi pembangunan dan pelayanan publik
- Aparat sipil negara (ASN) mendapatkan gaji tinggi dan kompetitif sesuai kinerja + penegakan integritas yang ketat
- Batasan yang jelas: politisi menentukan arah, teknokrat melaksanakan

Pelajaran untuk Indonesia

- ✓ Meritokrasi membangun kepercayaan dan efisiensi
- ✗ Mungkin tidak sepenuhnya dapat direplikasi karena skala, keragaman, dan budaya politik yang perlu dikondisikan

Pengalaman Negara Lain: Filipina: Perangkap Demokrasi Patronase

- Pemilihan umum yang kompetitif, tata kelola negara dihegemoni dan diatur sesuai kepentingan elit dan kroni-kroninya
- Birokrasi dipolitisasi hingga tingkat lokal, pemenang pemilu dan afiliasinya menempatkan orang, membuat kebijakan, dan mengalokasikan sumber daya negara sesuai kepentingannya
- Ketidaksetaraan terus terjadi meskipun terdapat pertumbuhan ekonomi

Pelajaran bagi Indonesia

⚠ Ini adalah jalur yang paling dekat akan dialami Indonesia, jika tidak ada perubahan mendasar dan segera.

Dua Jalur Bagi Indonesia: Skenario A – Konsolidasi Patronase

Fitur Utama

- Penunjukan berdasarkan loyalitas yang dinormalisasi
- Teknokrat bertindak sebagai penasihat, bukan pengambil keputusan
- Sumber daya negara digunakan untuk pemeliharaan koalisi

Keunggulan Jangka Pendek

- ✓ Keputusan cepat
- ✓ Stabilitas politik
- ✓ Disiplin koalisi

Risiko Jangka Menengah–Panjang

- Ketidakkonsistenan kebijakan
- Peningkatan ketimpangan
- Penangkapan elit
- Peningkatan ketidakpuasan sosial

Mitigasi yang Diperlukan (Jika Jalur Ini Dipilih)

- Subsidi besar-besaran untuk mencegah kerusuhan
- Pemerintahan berorientasi keamanan
- Pengelolaan narasi media

⚠ Biaya fiskal dan sosial yang tinggi

Dua Jalur Bagi Indonesia: Skenario B – Restorasi Meritokrasi

Narasi Utama: “Pemerintahan profesional berarti biaya hidup yang lebih murah, pekerjaan yang lebih baik, dan layanan yang lebih adil.”

Prinsip Desain Utama

- Bukan anti-politik, tetapi anti-ketidakmampuan
- Meritokrasi dipandang sebagai pro-rakyat, bukan elit
- Fokus pada layanan harian yang terlihat, bukan tata kelola yang abstrak

Pilar Reformasi Praktis

1. Zona Teknokratis yang Dilindungi
Membatasi pemulihan meritokrasi pada area berdampak tinggi:

- Perencanaan ekonomi
- Keamanan energi dan pangan
- Infrastruktur dan layanan publik
- Data, statistik, dan manajemen fiskal

👉 Penunjukan politik diizinkan di luar zona ini

Dua Jalur Bagi Indonesia: Skenario B – Restorasi Meritokrasi

2. Kontrak Kinerja untuk Menteri & Lembaga
Indikator Kinerja Utama (IKU) yang transparan dan
terukur:

- Penciptaan lapangan kerja
- Pengendalian inflasi
- Waktu penyampaian layanan
- Laporan kinerja publik tahunan

👉 Membuat teknokrasi terlihat dan akuntabel

3. Jalur Cepat Berbasis Prestasi untuk ASN
Ujian kompetitif terbuka untuk:

- Direktur Jenderal
- Eksekutif BUMN
- Penerimaan lateral diperbolehkan untuk profesional

👉 Menarik bagi aspirasi pemuda dan kelas menengah

4. Kerangka Anti-Oligarki

- “Negara profesional vs penguasaan elit”
- Publikasi konflik kepentingan
- Dashboard pengadaan yang transparan

👉 Mengubah teknokrasi menjadi politik moral

Indonesia tidak memilih antara teknokrasi dan
demokrasi, tetapi antara:

- Negara profesional yang melayani warga negara,
atau
- Mesin politik yang mengelola ketidakpuasan

Sejarah menunjukkan: Negara-negara yang menunda
reformasi meritokrasi akan menanggung konsekuensinya
saat krisis—dengan biaya yang jauh lebih tinggi.

Power & Resistance Matrix

Actor Group	Why They Resist Meritocracy	Risk Level	Typical Tactics
Presidential inner circle	Loss of influence & access	Very High	Narrative control, informal pressure
Political parties	Patronage funding disrupted	High	Legislative obstruction
Oligarchic business groups	Loss of regulatory favors	High	Media framing, lobbying
Senior political appointees	Exposure of incompetence	Medium-High	Bureaucratic sabotage
Local elites (Pemda)	Threat to rent distribution	Medium	Passive resistance
Lower-level ASN	Fear of evaluation	Low-Medium	Compliance slowdown

PENUTUP -1

Di negara yang begitu komplek, beragam, berbagai bentuk ketidaksetaraan masih dialami, dan bergantung pada sumber daya seperti Indonesia, mengesampingkan profesional dan teknokrat:

- Tidak mempermudah tata kelola—melainkan memperbesar risiko sistemik
- Dapat menciptakan stabilitas politik dalam jangka pendek, tetapi kerentanan dalam jangka menengah–panjang
- Berpotensi mengubah negara dari institusi pemecah masalah menjadi semata-mata mesin distribusi politik dan kekuasaan antar elit dan kroni-kroninya.

Indonesia berada di persimpangan yang menentukan. Tantangan yang kita hadapi—ketimpangan yang semakin melebar, bencana yang berulang, ketidakpastian ekonomi, dan menurunnya kepercayaan publik—tidak dapat diatasi hanya dengan kompromi politik, maupun dengan kenyamanan lingkaran dalam yang sempit. Stabilitas tanpa kemampuan adalah rapuh, dan kepemimpinan tanpa dukungan profesional tidak berkelanjutan.

PENUTUP -2

Perubahan tidak memerlukan pengabaian politik atau melemahkan otoritas demokratis. Perubahan memerlukan penyesuaian prioritas yang jelas: menempatkan kompetensi di bidang yang paling kompleks, memulihkan penghormatan terhadap pengalaman dan bukti, serta memastikan bahwa lembaga publik dibangun untuk melayani warga—bukan koalisi. Pemerintah yang efektif bukanlah yang terlihat sibuk, tetapi yang secara konsisten memberikan hasil, terutama saat krisis melanda dan saat warga biasa membutuhkan layanan yang andal.

Memulihkan meritokrasi dan profesionalisme bukanlah agenda elit. Ini adalah agenda rakyat—karena kebijakan yang lebih baik berarti biaya hidup yang lebih terjangkau, kesiapan bencana yang lebih baik menyelamatkan nyawa, dan layanan publik yang profesional memulihkan martabat dan keadilan. Ketika negara berfungsi, kepercayaan mengikuti; ketika kepercayaan tumbuh, legitimasi politik menguat.

PENUTUP -3

Indonesia memiliki talenta, lembaga, dan mandat demokratis untuk melakukan perubahan ini. Yang dibutuhkan saat ini adalah keberanian politik untuk memilih kapasitas daripada kenyamanan, sistem daripada jalan pintas, dan ketahanan nasional jangka panjang daripada akomodasi jangka pendek.

Pertanyaannya bukan lagi apakah perubahan mungkin dilakukan, tetapi apakah kita bersedia menjadikan kompetensi sebagai landasan masa depan Indonesia yang lebih maju sesuai cita-cita proklamasi..

Terima Kasih



Perkumpulan Amerta

info@amerta.or.id

www.amerta.or.id